

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	PJ Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Informasi tentang Profil Badan Publik</b>						
a	Kedudukan/domisili beserta alamat	Alamat, nomor kontak, alamat email	Sekretaris	2019	ONLINE	Selama Berlaku	bappeda.magelangkota.go.id
b	Visi dan Misi Kota		Sekretaris	2019	ONLINE	Selama Berlaku	bappeda.magelangkota.go.id
c	Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	SOTK, Kepala s/d Fungsional Tertentu	Sekretaris	2019	ONLINE	Selama Berlaku	bappeda.magelangkota.go.id
<b>2</b>	<b>Ringkasan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020</b>						
a	Nama Program dan Kegiatan	9 Program, 51 kegiatan	Sekretaris	2019	CETAK	Selama Berlaku	
b	Penilaian Kinerja	Hasil 2019 : B	Sekretaris	2019	ONLINE	Selama Berlaku	bappeda.magelangkota.go.id
c	RENJA Bappeda TA 2020			2019	CETAK	Selama Berlaku	
<b>3</b>	<b>Kinerja Kinerja</b>						
a	Capaian Kinerja	Target & Realisasi Kinerja Fisik & Keuangan	Sekretaris	2019	CETAK	Selama Berlaku	
<b>4</b>	<b>Informasi Keuangan</b>						
a	Perda APBD TA 2020	DPA BAPPEDA TA 2020	Sekretaris	2019	CETAK	Selama Berlaku	
<b>5</b>	<b>Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa</b>						
a	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Paket pengadaan, kode, nama paket, tahun anggaran	Sekretaris	2019	ONLINE	Selama Berlaku	sirup.lkpp.go.id

B. INFORMASI SETIAP SAAT



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

No	Informasi	Dasar Hukum	Kensekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata PNS terkait data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Th.2008 tentang KIP pasal 17 huruf h</li> <li>- UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d</li> </ul>	Rahasia pegawai diketahui pihak lain, sehingga mengganggu privasi, dan rawan untuk disalahgunakan	Rahasia Pegawai terjaga	Tanpa batas
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i</li> <li>- UU No.15 Tahun 2004 pasal 19</li> <li>- UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7</li> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9</li> </ul>	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Tidak terbatas/kecuali bila ada permohonan instansi terkait
3	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.15 Tahun 2004 pasal 19</li> <li>- UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7</li> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9</li> </ul>	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Setelah LHP diserahkan ke DPRD
4	Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l dan huruf j tentang Pengadaan Barang/Jasa	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai
5	Dokumen Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l</li> <li>- UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</li> <li>- Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama	Setelah proses tindak lanjut audit BPK